



Pengaruh good corporate governance terhadap pencegahan fraud pada pemerintahan daerah: Studi kasus Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan

(Studi Kasus Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan)

Edoe Nanda Saputra, Difa Alif Putri Wijaya, Dido Januar Wijaya Putra

Universitas Madura, universitas Muhammadiyah Malang, Institut Agama Islam Madura

Surel: edonanda2910@gmail.com

INFO ARTIKEL

JIAP Volume XI
Nomor 1
Halaman 32-50
Samata,
Januari-Juni 2026

ISSN 2441-3017
E-ISSN 2697-9116

Tanggal Masuk:
21 Mei 2026

Tanggal Diterima:
30 Juni 2026

ABSTRAK

Tindakan *fraud* yang belakangan ini marak terjadi di lingkungan pemerintahan dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Negara dan masyarakat umum, maka dari itu diperlukan upaya untuk meminimalisir tindakan tersebut. *Good Corporate Governance* (GCG) dapat menjadi sebuah solusi untuk mengurangi terjadinya tindakan *fraud* di lingkungan pemerintahan. Adanya penelitian ini memiliki tujuan agar dapat menjadi sebuah masukan untuk seluruh pihak yang memiliki kepentingan dalam mencegah terjadinya tindakan *fraud* di lingkungan pemerintahan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner yang diberikan secara online. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* di lingkungan pemerintahan dengan nilai r sebesar 0,877.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance, Pencegahan Fraud, Pemerintahan*
Acts of fraud that have recently been occurring in the government environment can cause enormous losses to the state and the general public, therefore efforts are needed to minimize these actions. Good Corporate Governance (GCG) can be a solution to reduce the occurrence of fraud in the government environment. The existence of this research has the aim that it can become an input for all parties who have an interest in preventing acts of fraud in the government environment. The data collection method in this study used a questionnaire given online. The data analysis used in this research is simple linear regression. The results showed that there was a positive and significant influence on fraud prevention in government circles with an r value of 0.877.

Keyword: *Good Corporate Governance, Fraud Prevention, Governance*

Copyright: Saputra, E. N. (2026). Pengaruh good corporate governance terhadap pencegahan fraud pada pemerintahan daerah; Studi kasus Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, Vol. 11 No. 1 (32-50). <https://doi.org/10.24252/jiap.v12i1.72537>

PENDAHULUAN

Fraud dalam arti luas adalah kesalahpahaman yang disengaja yang menyebabkan orang lain menderita kerugian, biasanya kerugian moneter. Fraud juga bisa didefinisikan suatu tindakan yang bertentangan terhadap hukum dan merupakan bentuk ketidakberesan perilaku pihak eksternal dan internal untuk memenuhi keuntungan pribadi Sayidah et al. (2021:49). Menurut (Association of Certified Fraud Examiners Indonesia, 2019) Tindakan kecurangan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu korupsi, kecurangan atas laporan keuangan, dan penyalahgunaan asset. Tindakan kecurangan atau biasa dikenal dengan fraud di Indonesia sangat cukup memprihatinkan. Hal ini dikarenakan Tindakan fraud atau kecurangan semakin marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan jenis perilaku fraud dapat dibagi kedalam dua sektor, yaitu : sektor public dan sektor swasta. (Qasimah, 2022) perusahaan maupun pemerintah. Menurut ACFE, 2019) lembaga pemerintahan adalah salah satu organisasi yang paling dirugikan oleh adanya perilaku kecurangan.

Fraud pada umumnya sangat identic dengan teori segitiga kecurangan yang dirumuskan oleh Cressey 1953 yang mengemukakan bahwa Tindakan kecurangan yang dilakukan oleh orang atau pelaku dapat di dasarkan terhadap tiga kondisi antara lain: (1) persepsi tekanan; (2) persepsi kesempatan; (3) dan persepsi adanya rasionalisasi. Persepsi tekanan merupakan salah satu penyebab terjadinya kecurangan yang didasari oleh kondisi psikologi pelaku. Sedangkan persepsi opportunity merupakan kondisi yang menciptakan adanya peluang untuk terjadinya kecurangan. Yang terakhir adalah persepsi rasionalisasi yang merupakan suatu kondisi yang berupa pembenaran terhadap Tindakan kecurangan. Teori segitiga kecurangan tersebut dapat menjadi penyebab adanya kecurangan baik di lingkungan swasta maupun pemerintahan.

Menurut (Cressey, 1953) Tindakan fraud lebih besar kemungkinannya terjadi pada lingkungan pemerintahan, karena dalam pemerintahan memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks. Selain itu, (Saputra, 2012) mengatakan dalam ruang lingkup pemerintahan Tindakan fraud dapat terjadi juga karena disebabkan oleh adanya desentralisasi atau bisa juga disebut otonomi daerah. Jika ditinjau dari arti otonomi daerah menurut undang-undang mengemukakan bahwa suatu pemerintahan daerah memiliki kewenangan secara luas dalam hal mengelola maupun mengurus berbagai kepentingan masyarakatnya yang disesuaikan terhadap kebutuhan dan potensi yang ada pada daerahnya masing-masing. Suatu otonomi daerah tersebut pada dasarnya merupakan sebuah kesempatan terbuka bagi agen/pemerintah untuk melakukan Tindakan yang dapat merugikan negara maupun masyarakat. Otonomi daerah dapat menyebabkan timbulnya asimetri informasi atau suatu keadaan yang menunjukkan adanya ketidakadilan dalam usaha untuk memperoleh informasi antara pemerintah

daerah dengan masyarakat sebagai pihak penyedia informasi dan pengguna informasi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Farah & Rahmawati, 2021) mengemukakan bahwa jenis instansi yang paling memungkinkan dalam melakukan kecurangan selama tiga tahun berturut-turut pada periode 2018-2020 merupakan pemerintah kabupaten atau kota. Pelaku kecurangan yang terjadi di pemerintahan pada umumnya merupakan ASN ataupun karyawan yang bekerja di pemerintahan.

Ada banyak kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia melibatkan pihak instansi pemerintahan. Pada tahun 2020, KPK yang merupakan Lembaga independent untuk menangani kasus fraud melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 6 orang meliputi menteri sosial yang terindikasi terlibat kasus suap dalam pengadaan bantuan COVID-19. Ada beberapa kasus fraud yang terjadi pada pemerintahan, seperti daerah kota cimahi pada tahun 2016 dan tahun 2020 KPK menangkap walikota cimahi pada periode yang berbeda terindikasi melakukan Tindakan fraud berjenis korupsi terkait proyek pembangunan rumah sakit senilai RP.1,661 Milya. Adapun kasus sebelumnya terkait dugaan suap proyek pembangunan pasar atas tahap II.

Pada tahun 2023 kejaksan negeri aceh barat menetapkan tiga tersangka korupsi proyek lokasi musabaqah tilawatil quran (MTQ) 2020 di aceh barat. Adapun tiga tersangka tersebut melibatkan salah satu aparatur sipil negara. Kasus tersebut menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi negara yaitu sebesar Rp. 399 Juta. Berdasarkan beberapa kasus diatas, dapat diketahui bahwa fraud yang terjadi di lingkungan pemerintah dapat menyebabkan kerugian bagi negara maupun masyarakat. Oleh karna itu di perlukan adanya suatu sistem untuk meminimalisir tindakan fraud di lingkungan pemerintah.

Adapun sistem tersebut biasa dikenal dengan istilah "Good corporate governance". Pendapat tersebut sejalan oleh (Ulum & Suryatimur, 2022) Mengatakan bahwa peran good corporate governance dapat menjadi upaya untuk mengurangi terjadinya fraud di lingkungan pemerintah. (Manossoh, 2016) dalam bukunya mendefinisikan GCG sebagai suatu pegangan bagi suatu korporasi yang penting untuk diterapkan dalam rangka pengelolaan untuk mencapai suatu cita-cita yang ditargetkan. Oleh karena itu good corporate governance dapat membuat suatu system yang efektif dan efisien dalam menerapkan prinsip-prinsip yang ada, seperti: transparansi, independent, akuntabel, dll. Dengan diwujudkanannya suatu tata Kelola dengan kualitas baik maka akan berdampak terhadap hasil kinerja yang baik pula, sehingga tanpa disadari akan menyebabkan organisasi pemerintahan tersebut memiliki nilai tambah (Epriliani, 2022)

Telah banyak Penelitian yang dilakukan terkait pengaruh good corporate governance terhadap pencegahan fraud, namun beberapa penelitian terdahulu masih terdapat gap research. (Faiqoh, 2019) dalam

penelitiannya menyimpulkan bahwa “keberadaan GCG yang bagus masih belum mampu untuk menjadi pengurang Tindakan fraud yang terjadi”. (Adiko, Astuty, & Hafsah, 2019) menyimpulkan bahwa “peran GCG belum mampu menjadi Upaya dalam melakukan pencegahan terhadap fraud yang terjadi”. Berbeda dengan beberapa penelitian diatas, Kurniawan C. dalam penelitiannya pada tahun 2019 menyatakan bahwa “pelaksanaan GCG dapat menjadi usaha untuk meminimalisir terjadinya fraud”. Pendapat tersebut sejalan dalam penelitian yang dilakukan oleh Soleman R. tahun 2013 “prinsip tata Kelola merupakan Upaya untuk mengurangi potensi terjadinya fraud”.

Oleh karena itu, beberapa fenomena dan permasalahan diatas menjadi alasan seberapa penting penelitian “pengaruh good corporate governance terhadap pencegahan fraud pada pemerintahan daerah”, dilakukan. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yang disusun adalah apakah good corporate governance berpengaruh terhadap fraud di lingkungan pemerintahan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan seluruh pihak yang berkepentingan dalam mencegah terjadinya fraud di lingkungan pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

Asimetri Informasi

Merujuk pada pendapat Atmaja 2008 dalam penelitiannya yang membahas teori asimetri informasi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya suatu keadaan yang apabila terdapat dua belah pihak dan salah satu diantaranya memiliki pengetahuan lebih banyak terhadap suatu informasi dibandingkan dengan pihak lain maka hal tersebut dinyatakan sebagai asimetri informasi. Dalam teori asimetri informasi tersebut terbagi lagi menjadi dua macam, hal ini didasarkan terhadap pendapat scott pada tahun 2000. Adapun dua macam asimetri informasi tersebut antara lain: Adverse selection dan Moral Hazard. Keberadaan asimetri informasi ini pada hakikatnya akan membawa suatu fenomena terhadap suatu keadaan yang dapat menimbulkan konflik hingga berujung terhadap Tindakan kecurangan.

Pengertian Fraud

Merujuk pada pendapat Albrecht, et. al. 2011, “mengenai fraud yang dimana merupakan semua cara yang dapat dirancang oleh seseorang, dengan tujuan mengambil keuntungan dari yang lain, fraud juga sering disebut juga tindakan penipuan dan kebohongan dengan adanya representasi yang salah”. Sementara menurut pendapat Pusdiklatwas yang telah mendefinisikan fraud sebagai berikut: “Fraud didefinisikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh pihak eksternal maupun internal, untuk memperoleh keuntungan pribadi, dan kelompok secara langsung maupun tidak langsung yang dengan sengaja merugikan pihak lain.” Menurut salah satu asosiasi yang menangani fraud yaitu ACFE

pada tahun (2020), “fraud mencakup segala tingkah laku yang bertentangan dengan hukum yang di sengaja untuk merampas hak milik orang lain dengan tipu muslihat, penipuan, atau tindakan tidak adil lainnya”.

Jenis-Jenis Fraud

Merujuk pada pendapat The Association of Certified Fraud Examinations “kasus kecurangan sendiri terbagi 3 jenis perbuatan yaitu tindakan penyalahgunaan aset, korupsi, dan kecurangan pelaporan. 1) Asset Misappropriation, dalam sebuah penyalahgunaan aset yang di lakukan secara sadar atau dengan sengaja bisa di katakan sebuah tindakan pengambilan aset secara ilegal dan tindakan ini sangat tidak di benarkan oleh pihak yang berwenang serta pihak yang mengawasi dalam penggunaan aset. aset juga sangat rentan terjadi kepada perusahaan atau instansi entah yang di curigai yang terkait tanpa izin dari pihak yang berwenang serta pihak yang mengawasi aset tersebut dan yang seperti kita ketahui aset sendiri bias berbentuk kas atau di sebut juga dengan uang tunai (cash misappropriation), banyak cara yang bias di lakukan salah satu caranya yang sudah tidak lumrah lagi dengan cara melakukan tindakan penyimpangan atau melakukan skimming yang sering di sebut juga dengan penggelapan uang. Sedangkan penyalahgunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi biasa juga di lakukan dengan cara non-cash misappropriation dimana para pihak pelaku fraud sendiri bias menggunakan fasilitas perusahaan bahkan lembaga untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan berbagai banyak hal di sekitarnya. 2) Corruption merupakan sebuah tindakan korupsi yang dimana tindakan yang di lakukan oleh seseorang menggunakan tindakan secara langsung mempengaruhi transaksi dalam bisnis dalam mendapat penghasialan yang perlu di ketahui itu tidak sah. kecurangan ini terdiri atas beberapa konflik kepentingan, seperti adanya suap, gratifikasi yang ilegal, dan pemerasan ekonomi.3) sedangkan untuk kecurangan laporan keuangan yang terjadi karena adanya Kesalahan pembuatan laporan keuangan, terjadi karena adanya bentuk salah saji, yaitu sebuah laporan tindakan ketetapan dalam sebuah pengukuran, serta pengklafikasian keuangan yang terlalu besar(overstatement) atau terlalu kecil(understatement).kecuranganitu sendiri dapat dilakukan dalam proses penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan cara melaporkan kondisi yang lebih baik dari sebenarnya guna untuk memenuhi kepentingan internal maupun eksternal dalam sebuah instansi\perusahaan”.

Teori Fraud Triangle

Pada tahun 1953, Cressey mencetuskan sebuah gagasan mengenai factor penyebab kecurangan yang dideklarasikan dengan istilah Teori fraud triangle. Adapun teori tersebut mengadung 3 unsur menurut Cressey “Fraud triangle menjelaskan adanya tiga faktor yang ada didalam setiap situasi fraud, Yaitu Pressure, Opportunity, dan Rasionalization”. (Purnawati, 2018) Menyatakan “elemen-elemen yang ada di dalam fraud triangle dapat dipakai

sebagai alat pendeteksi kecurangan yang diantaranya, A) Pressure, tekanan untuk melakukan fraud. B) Opportunity, factor yang menciptakan kemungkinan suatu kecurangan terjadi. C) Rasionalization, merupakan adanya perilaku, karakteristik, atau pembenaran bagi seseorang ataupun kelompok untuk melakukan kecurangan”.

Indikator Pencegahan Fraud

Terdapat beberapa indikator pencegahan fraud, yaitu : A) Proses rekrutmen yang jujur. Merupakan suatu kesadaran saat melakukan rekrutmen pada karyawan agar terhindar dari suatu bentuk kecurangan misalkan ketika hendak mengisi kursi jabatan yang sedang kosong. B) Adanya kode etik yang jelas sehingga mudah untuk dipahami. Merupakan kondisi dimana perusahaan tidak memiliki pemahaman terhadap kode etik yang ada yang dapat menimbulkan salah tafsir bagi karyawan perusahaan. Hal yang dapat ditimbulkan dari adanya ketidaktahuan ini, dapat membuat seorang pegawai melakukan kecurangan demi hal yang diinginkan. C) penerapan sanksi. Merupakan suatu kebijakan yang diberlakukan dalam bentuk sanksi secara adil dan tegas yang diharapkannya dapat memberikan pandangan kepada rekan kerja lainnya agar turut serta melakukan kecurangan sehingga berdampak tidak baik bagi diri sendiri maupun bagi tempat ia bekerja.

Pengertian Good Corporate Governance

Good Corporate Governance yaitu suatu peraturan yang mengatur hubungan seluruh pemangku kepentingan yang ada dalam rangka pengendalian perusahaan. Adapula Corporate Governance yaitu pengelolaan perusahaan yang didasarkan terhadap seluruh peraturan dan system yang ada, kaunang (2015). Sedangkan menurut ”. (Adiko, Astuty, & Hafsah, 2019) GCG diartikan sebagai “sebuah system yang terstruktur meraih tujuan dengan menciptakan sumber daya yang efektif berdasarkan prinsip-prinsip seperti transparan, akuntabel, pertanggungjawaban, independent, dan adil”. Menurut Marciano, dkk (2021) menyatakan bahwa “GCG merupakan seperangkat peraturan terkait hak dan kewajiban antara pihak eksternal dan internal”.

Indikator Pengukuran Good Corporate Governance

Adapun pengukuran good corporate governance didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ulum.S.,&Suryatimur.K, 2022, menyatakan bahwa indikator GCG antara lain sebagai berikut: 1) “integritas dan ketidakberpihakan: melakukan pekerjaan secara tuntas, berpegang teguh terhadap etika, dan menyesuaikan terhadap kepentingan organisasi”; 2) “mempromosikan kebaikan public: melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan dilandasi rasa bahwa aktivitas pekerjaan yang dilakukan semata-mata demi kepentingan public dan organisasi”; 3) “komitmen terhadap system pemerintahan: professional dalam melaksanakan kebijakan dan keputusan yang ada”; 4) akuntabilitas dan transparansi: memiliki tanggungjawab dalam menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan

prinsip akuntabilitas dan keterbukaan”; 5) “pertahanan public= menjamin organisasi untuk mewujudkan setiap aspirasi dan keinginan dari public serta menerapkan mekanisme dalam rangka memastikan bahwa komitmen tersebut dapat dipertahankan”.

Didasarkan pada beberapa uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Keberadaan GCG memiliki peran yang sangat penting untuk mengurangi Tindakan asimetri, menjamin rasa kepercayaan, dapat mengurangi biaya, memberi keyakinan atas legalitas, serta merupakan komponen penambah nilai terhadap organisasi. Suatu tata Kelola yang baik penting dilaksanakan untuk mendukung adanya manfaat supaya aktivitas yang akan dilakukan dijalankan sesuai dengan rencana awal.

Oleh karena itu, kerangka dalam penelitian ini menjelaskan bahwa GCG berpengaruh terhadap pecegahan fraud di lingkungan pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif digunakan sebagai jenis penelitian dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2017), jenis penelitian deskriptif merupakan “ sebuah penelitian yang memiliki tujuan untuk melakukan deskripsi terhadap suatu hal secara akurat dan sistematis”.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan salah satu instansi pemerintah daerah kabupaten pamekasan untuk menjadi Tempat dalam penelitian ini yaitu dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata kabupaten pamekasan yang beralamat di jalan darma no. 12.

Populasi

Menurut Sudaryono dalam penelitiannya tahun (2017), mengemukakan “populasi merupakan sebuah objek ataupun subjek secara keseluruhan dengan karakteristik dan kualitas yang ditentukan untuk menarik sebuah kesimpulan”. Dalam penelitian ini seluruh ASN yang bekerja pada dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata kabupaten pamekasan ditentukan sebagai populasi.

Sampel

Menurut Priyastama (2017) “sampel merupakan Sebagian dari populasi”. Probability sampling jenis simple random sampling digunakan dalam penelitian ini sebagai Teknik penentuan sampel. Berikut ini adalah rumus dalam pengambilan sampel:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

“E : Toleransi Terjadinya Kesalahan (10%)”

“N : Total Populasi”

“n : Jumlah Sampel”

Adapun perhitungan sampel yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{45}{1 + 45 (0,1)^2}$$

Dan diperoleh hasil 31,0344 dibulatkan menjadi 31.

Jenis Data

Data kuantitatif ditentukan dalam penelitian ini sebagai jenis data penelitian. “data kuantitatif adalah data dengan bentuk angka untuk dilakukan perhitungan statistika”, Siyoto, dkk (2015).

Sumber Data

Data primer digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini. menurut Soewadji (2012) data primer disebut sebagai “data yang diperoleh secara langsung”. Adapun data dalam penelitian ini diperoleh dengan memberikan kuisioner secara online dengan menggunakan skala likert 1-5 dengan sangat setuju – sangat tidak setuju.

Uji Instrumen data

Adapun Teknik Uji Instrumen data adalah sebagai berikut:

a. Uji Validitas

Merujuk pada pendapat Priyatno tahun (2017) mengemukakan bahwa “uji validitas dilakukan guna menguji sejauh mana suatu kuisioner dapat dikatakan cermat dengan dasar pengambilan keputusan nilai r hitung lebih besar dari nilai r table”.

b. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2018), “Uji Reliabilitas merupakan alat untuk sejauh mana kuisioner dikatakan handal dengan dasar pengambilan keputusan nilai cronbach’s alpha lebih besar 0,60”.

Uji Asumsi Klasik

Adapun uji asumsi klasik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas (Shapiro Wilk)

Menurut “Ghozali” (2011) menyatakan bahwa “uji normalitas merupakan alat pengujian untuk menentukan sebuah model regresi suatu data dalam penelitian berdistribusi normal”. Adapun jenis uji normalitas menggunakan Shapiro Wilk dikarenakan sampel dalam penelitian ini kurang dari 50. Sedangkan kriteria pengambilan keputusan didasarkan terhadap pendapat sarjono dan julianto (2011) yang menyatakan bahwa “suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai sig lebih besar dari 0,05”.

b. Uji Multikolinearitas

Ghozali (2011) mengungkapkan “uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel independent dengan dasar pengambilan keputusan apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 maka dikatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas.”

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011) menyatakan bahwa “uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana model regresi terjadi

ketidaksamaan dengan dasar pengambilan keputusan apabila nilai sig. lebih dari 0,05 dikatakan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas”.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Menurut Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa “regresi linear sederhana dipakai apabila hanya terdapat satu variabel dependen dan satu variabel independent”. Dalam penelitian yang dilakukan ini, analisis regresi linear sederhana dipakai untuk mengukur sejauh mana pengaruh GCG sebagai X terhadap fraud sebagai Y.

Berikut merupakan rumus persamaan yang digunakan:

$$Y = a + bx$$

Keterangan:

Y = Fraud

a = Bilangan Konstan

b = Koefisien Regresi

X = GCG

Koefisien Determinasi R²

Siregar (2013) mendefinisikan “koefisien determinasi sebagai penunjuk sejauh mana kontribusi variabel X untuk menjelaskan variabel Y”. Semakin tinggi nilai yang dihasilkan oleh koefisien determinasi maka semakin bagus pula penelitian yang dilakukan.

Uji t

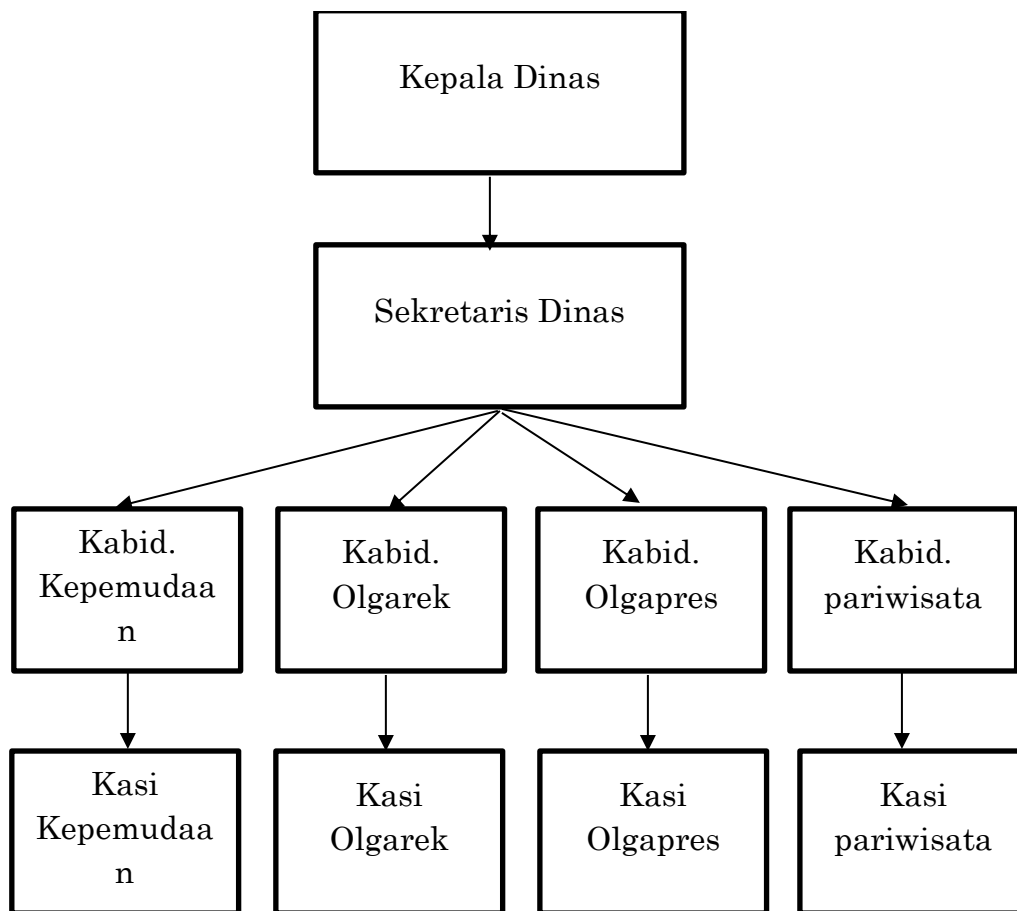
“Uji t digunakan dalam rangka mengetahui sejauh mana variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen dengan dasar pengambilan keputusan apabila sig. lebih kecil dari 0,05 maka dikatakan bahwa variabel independent memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen”, (sujarweni, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu instansi pemerintahan daerah yang terletak di kabupaten pamekasan tepatnya di jalan darma no. 12. Dinas kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata menurut perbup pamekasan no 19 tahun 2021. Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata atau bisa disingkat DISPORAPAR di pimpin oleh seorang kepala dinas yang membawahi kesekretariatan, bidang kepemudaan, bidang olahraga prestasi, dan bidang olahraga rekreasi. Adapun jumlah ASN yang bekerja di DISPORAPAR ini sebanyak 45 orang. Adapun susunan organisasi dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata kabupaten pamekasan adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.
Struktur Organisasi**



Sumber: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan

**Tabel 1.
Uji Validitas**

Alat Ukur	Jumlah Item Diujikan	Jumlah Item Valid	Indeks Validitas	
			R Hitung	R tabel
GCG	10	10	0,474 – 0,833	0,3440
Fraud	10	10	0,510 – 0,875	0,3440

Sumber: data diolah peneliti

Adapun dasar pengambilan keputusan suatu item pertanyaan dikatakan valid apabila “nilai r hitung lebih besar daripada nilai r table”. Dalam penelitian ini, memiliki responden sebanyak 31 orang dengan dua item pertanyaan dan masing masing item pertanyaan terdiri dari 10 pertanyaan. Dari hasil output SPSS untuk uji validitas dalam variabel X yang diproksikan GCG semua item pertanyaan valid. Kemudian hasil output SPSS untuk uji validitas dalam variabel Y yang diproksikan dengan Fraud semua item pertanyaan yang ada juga valid.

Tabel 2.
Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
.949	20

Sumber: data diolah peneliti

Adapun dasar pengambilan keputusan apabila “jawaban responden dikatakan reliabel apabila nilai alpha lebih besar dari 0,70”. Berdasarkan hasil output SPSS untuk uji reliabilitas dalam penelitian ini sebesar 0,949 dengan jumlah item sebanyak 20.

Tabel 3.
Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
tf	.142	31	.115	.950	31	.154
tgcg	.120	31	.200*	.939	31	.075

Sumber: data diolah peneliti

Adapun dasar pengambilan keputusan suatu “data dalam penelitian dikatakan berdistribusi normal apabila nilai sig. lebih besar dari 0,05”. Berdasarkan hasil output SPSS di atas mengenai uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk diketahui bahwa variable y yang diproksikan menggunakan fraud memiliki nilai sig. sebesar 0,154 sedangkan variable x yang diproksikan menggunakan GCG memiliki nilai sig. sebesar 0,075. Oleh karena itu, data dalam penelitian ini baik variable y dan variable dapat dikatakan berdistribusi normal karena memiliki nilai sig. lebih besar dari 0,05.

Tabel 4.
Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.131	4.222	.268	.791		
	tgcg	.959	.098	.877	.000	1.000	1.000

Sumber: data diolah peneliti

Adapun dasar pengambilan keputusan suatu penelitian dikatakan tidak terjadi masalah multikolinearitas “apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10,00”. Berdasarkan hasil output SPSS di atas mengenai uji multikolinearitas diketahui bahwa nilai tolerance sebesar 1 dan nilai VIF menunjukkan angka sebesar 1. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikatakan tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Tabel 5.
Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.638	2.780	.589	.560
	tgcg	.006	.064	.016	.930

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: data diolah peneliti

Adapun dasar pengambilan keputusan suatu penelitian dikatakan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas “apabila nilai sig. memiliki nilai lebih dari 0,05”. Berdasarkan hasil output SPSS dihasilkan nilai sig. sebesar 0,930 yang menandakan bahwa penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil output uji instrument dan uji asumsi klasik dapat dipastikan bahwa penelitian ini telah memenuhi syarat untuk lanjut pada analisis regresi linear sederhana.

Tabel 5.
Uji Regresi Linear Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.131	4.222	.268	.791
	tgcg	.959	.098	.877	.000

a. Dependent Variable: tf

Sumber: data diolah peneliti

Hasil perhitungan regresi linear sederhana menggunakan program SPSS dalam penelitian ini dapat dilihat pada table diatas. Pada table

koefisien di atas dapat dijelaskan tentang persamaan regresi pada penelitian ini. Adapun rumus persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

$$Y = 1.131 + 0.959x$$

Dari persamaan regresi diatas, maka kesimpulan yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

Dari hasil output SPSS diatas dapat diketahui bahwa nilai konstanta dalam penelitian ini menunjukkan angka positif sebesar 1.131

Dari hasil output SPSS diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi GCG menunjukkan angka positif sebesar 0,959. hal tersebut mengartikan bahwa semakin giat pelaksanaan GCG maka potesi untuk mencegah terjadinya fraud juga semakin tinggi.

Tabel 6.
Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.877 ^a	.769	.761	2.58576

a. Predictors: (Constant), tgcg

Sumber: data diolah peneliti

Dalam hasil output SPSS diatas menunjukkan nilai r sebesar 0,877 menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara variabel independent yang diukur menggunakan GCG dengan variabel dependen yang diukur menggunakan fraud. Adapun dalam table diatas dapat diketahui bahwa nilai r square menunjukkan angka sebesar 0,769. Hal ini menunjukkan bahwa GCG sebagai variabel independent mempunyai pengaruh sebesar 76,9% terhadap Fraud sebagai variabel dependen sedangkan sisanya (100% - 76,9% = 23,1%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini.

Tabel 7.
Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.131		.268	.791
	tgcg	.959	.877	9.823	.000

a. Dependent Variable: tf

Sumber: data diolah peneliti

Berdasarkan output SPSS di atas dapat diketahui bahwa nilai sig. variabel GCG adalah sebesar 0,000 dengan nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,959. Berdasarkan hal tersebut maka kesimpulan yang didapat adalah GCG memiliki pengaruh positif signifikan terhadap fraud. Hal ini menandakan bahwa Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan telah menerapkan GCG yang tinggi sehingga pencegahan terjadinya kecurangan juga semakin tinggi.

Pembahasan

Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana, didapatkan bahwa peran GCG memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan. Hasil pengujian regresi linear sederhana dan tingkat signifikansi uji t menunjukkan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,959 dengan nilai sig. 0,000.

Berdasarkan hasil jawaban 31 responden yang dikumpulkan, dapat diketahui beberapa hal yang menyebabkan keberadaan GCG mampu berpengaruh terhadap pencegahan fraud di lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.

Item pertanyaan mengenai indikator GCG “integritas dan ketidakberpihakan” yang diwakili oleh item gcg1 dan gcg2 menunjukkan nilai rata 4 pada setiap item. Hal ini menunjukkan bahwa dari ke 31 ASN yang ditentukan sebagai sampel telah melaksanakan prinsip Good corporate governance dengan proksi “berintegritas dan ketidakberpihakan”. Dari ke 31 ASN yang ditentukan sebagai sampel pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan dapat dikatakan “telah bekerja dengan totalitas pada tugas dan tanggung jawab yang diberikan”. Selain itu juga dapat dikatakan “telah melakukan tugas yang diberikan sesuai dengan etika yang ada”.

Item pertanyaan mengenai indikator GCG “mempromosikan kebaikan ke public” yang diwakili oleh dua item yaitu gcg3 dan gcg4 menunjukkan nilai rata-rata 4 pada setiap item. Hal ini menunjukkan bahwa dari ke 31 ASN yang ditentukan sebagai sampel dalam penelitian ini telah melaksanakan prinsip Good Corporate Governance dengan proksi “mempromosikan kebaikan ke public”. Dari ke 31 ASN yang ditentukan sebagai sampel pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan dapat dikatakan “telah berkontribusi secara maksimal dalam peningkatan produktivitas kerja”. Selain itu juga dapat dikatakan “telah maksimal dalam bekerja untuk mencapai tujuan”.

Item pertanyaan mengenai indikator GCG “komitmen terhadap system pemerintahan” yang diwakili oleh dua item yaitu gcg5 dan gcg6 menunjukkan nilai rata-rata 4 pada setiap item. Hal ini menunjukkan bahwa dari ke 31 ASN yang ditentukan sebagai sampel dalam penelitian ini telah melaksanakan prinsip Good Corporate Governance dengan proksi “komitmen terhadap system pemerintahan”. Dari ke 31 ASN yang

ditentukan sebagai sampel pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan dapat dikatakan “telah bekerja secara professional sesuai dengan jabatan yang ditempati”. Selain itu juga dapat dikatakan “telah melakukan tugas berdasarkan kebijakan dan keputusan yang ada”.

Item pertanyaan mengenai indicator GCG “akuntabilitas dan transparansi” yang diwakili oleh dua item yaitu gcg7 dan gcg8 menunjukkan nilai rata-rata 4 pada setiap item. Hal ini menunjukkan bahwa dari ke 31 ASN yang ditentukan sebagai sampel telah melaksanakan prinsip Good Corporate Governance dengan proksi “akuntabilitas dan transparansi”. Dari ke 31 ASN yang ditentukan sebagai sampel pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan dapat dikatakan “bertanggungjawab atas setiap keputusan yang diambil secara transparan sesuai dengan SOP”. Selain itu juga dapat dikatakan “telah mengikuti prosedur kerja dan memenuhi standar kerja yang telah ditetapkan”.

Item pertanyaan mengenai indicator GCG “pertahanan publik” yang diwakili oleh dua item yaitu gcg9 dan gcg10 menunjukkan nilai rata-rata 4 pada setiap item. Hal ini menunjukkan bahwa dari 31 ASN yang menjadi sampel dalam penelitian ini telah melaksanakan prinsip Good Corporate Governance dengan proksi “pertahanan publik”. Dari ke 31 ASN yang ditentukan sebagai sampel pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan dapat dikatakan “telah memiliki komitmen kerja untuk mendukung kelangsungan organisasi”. Selain itu juga dapat dikatakan “telah mempunyai komitmen yang kuat dalam tiap individu dalam rangka menciptakan hasil yang optimal”.

Item pertanyaan mengenai indicator pencegahan fraud “proses rekrutmen yang jujur” yang diwakili oleh empat item yaitu f1, f2, f3, dan f4 menunjukkan nilai rata-rata 4 pada setiap item. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan melalui 31 ASN yang menjadi sampel dalam penelitian ini telah melaksanakan Upaya pencegahan fraud dengan proksi “proses rekrutmen yang jujur”. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan melalui 31 ASN yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dikatakan “telah melakukan rangkaian proses seleksi yang ketat dan efektif dalam proses”. Selain itu juga dapat dikatakan “telah melakukan pengecekan latar belakang pegawai sebelum menjadi ASN maupun ketika akan menduduki suatu jabatan tertentu”. Serta dapat dikatakan “telah melakukan pelatihan secara rutin dan continue tentang seperangkat peraturan yang harus dipatuhi. Dan juga dapat dikatakan bahwa Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan “telah melakukan fungsi evaluasi terhadap kontribusi ASN dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif”.

Item pertanyaan mengenai indicator pencegahan fraud “kode etik yang jelas, mudah dipahami dan ditaati” yang diwakili oleh tiga item yaitu f5,

f6,dan f7,menunjukkan nilai rata-rata 4 pada setiap item. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan melalui 31 ASN yang menjadi sampel dalam penelitian ini telah melaksanakan Upaya pencegahan fraud dengan proksi “kode etik yang jelas, mudah dipahami dan ditaati”. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan melalui 31 ASN yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dikatakan “telah menerapkan atura terkait perilaku dalam mewujudkan budaya organisasi jujur dan keterbukaan”. Selain itu juga dapat dikatakan “telah menerapkan sanksi terhadap setiap pelanggaran atas aturan perilaku kode etik dalam organisasi”. Serta dapat dikatakan “telah memberikan bentuk perhatian dan bantuan terhadap setiap pegawai yang sedang mengalami kesusahan”.

Item pertanyaan mengenai indicator pencegahan fraud “adanya sanksi terhadap segala bentuk kecurangan” yang diwakili oleh tiga item yaitu f8, f9, dan f10 menunjukkan nilai rata-rata 4 pada setiap item. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan melalui 31 ASN yang menjadi sampel dalam penelitian ini telah melaksanakan Upaya pencegahan fraud dengan proksi “adanya sanksi terhadap segala bentuk kecurangan”. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan melalui 31 ASN yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dikatakan “telah melaksanakan penerapan sanksi atau hukuman dalam rangka mengurangi adanya peluang terjadinya kecurangan untuk memberikan efek jera”. Selain itu juga dapat dikatakan “telah memberikan ketegasan terhadap seluruh pegawai bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajiban dengan memperhatikan moral, etika, serta teladan yang sebagaimana mestinya”. Serta dapat dikatakan “telah melakukan pelatihan kewaspadaan terhadap segala bentuk jenis kecurangan yang disesuaikan dengan tanggungjawab kerja pada setiap individu pegawai”.

Penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan C. dalam penelitiannya pada tahun 2019 menyatakan bahwa “pelaksanaan GCG dapat menjadi usaha untuk meminimalisir terjadinya fraud”. Penelitian ini juga sejalan dalam penelitian yang dilakukan oleh Soleman R. tahun 2013 “prinsip tata Kelola merupakan Upaya untuk mengurangi potensi terjadinya fraud”.

Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa peran dan keberadaan good corporate governance sebagai sekumpulan peraturan untuk menjaga agar aktivitas operasional tetap dalam koridor yang diinginkan sehingga akan berdampak terhadap semakin tinggi pula Tindakan fraud atau kecurangan dapat diminimalisir.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: Good corporate governance memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud pada lingkungan pemerintahan khususnya Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan. Semakin kiat suatu organisasi mengimplementasikan prinsip-prinsip good corporate governance maka pencegahan fraud yang ada juga dapat menjadi semakin kuat untuk meminimalisir kemungkinan terjadi fraud atau kecurangan.

Berdasarkan pengalaman langsung dalam melakukan melaksanakan proses penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin dapat menjadi pengaruh terhadap hasil penelitian ini. Sehingga diharapkan agar penelitian selanjutnya lebih disempurnakan agar memperoleh hasil penelitian yang maksimal. Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut : Adanya keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian. Terdapat keterbatasan dalam hal kemampuan responden yang kurang memahami pertanyaan pada kuisioner yang diakibatkan dari penyebaran kuisioner secara online menggunakan media google form. Penelitian ini hanya melakukan pengkajian terhadap pengaruh good corporate governance terhadap pencegahan fraud pada lingkungan pemerintahan studi kasus dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata kabupaten pamekasan.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan serta keterbatasan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Bagi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan, Dalam melakukan promosi jabatan sebaiknya lebih didasarkan terhadap factor prestasi kerja yang dicapai selama beberapa tahun belakangan. Melakukan rotasi jabatan khususnya bagi pejabat struktural yaitu kepala bidang agar fraud semakin bisa diminimalisir. Di masa mendatang, sebaiknya kepala dinas selaku pimpinan dapat menerapkan Teknik sidak secara mendadak ataupun juga terjadwal untuk mengetahui pelaksanaan good corporate governance secara pasti. Hal ini dimaksudkan agar bisa diketahui secara lebih nyata penerapan good corporate governance yang dilaksanakan dalam dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata kabupaten pamekasan.

Bagi peneliti selanjutnya, Disarankan pada penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independent baru seperti whistle blowing. Melakukan penelitian terhadap factor yang menyebabkan terjadinya fraud pada lingkungan pemerintahan. Dapat menambah adanya variabel moderasi untuk semakin menyempurnakan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiko, R. G., Astuty, W., & Hafsa. (2019). Pengaruh Pengendalian Intern, Etika Auditor, Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pt. Inalum. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer, 52-68.
- Association Of Certified Fraud Examiners. (2020). Survei Fraud Indonesia 2019. Jakarta: Acfe Indonesia Chapter.
- Atmaja, L. S. (2008). Teori & Praktik Manajemen Keuangan. Yogyakarta: Cv. Andi Offset.
- Cressey, D. R. (1953). Others People Money, A Study In The Social Psychology. Montclair.
- Epriliani, D. (2022). Pengaruh Penerapan Good Governance, Pengawasan Intern Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru . Jurnal Ilmiah Akuntansi, 79-90.
- Faiqoh, H. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Goodcorporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud. Universitas Islam Sultan Agung, 1-73.
- Farah, W., & Rahmawati, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Melakukan Kecurangan (Fraud) Pada Aparatur Sipil Negara (Asn). Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi, 127-138.
- Imam, G. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Imam, G. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Jusuf, S. (2012). Pengantar Metodologi Peneletian. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kurniawan, P. C., & Izzaty, K. N. (2019). Engaruh Goodcorporate Governancedan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud. Econbank: Journal Of Economics And Banking, 55-60.
- Manossoh, H. (2016). Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Bandung: Pt.Norlive Kharisma Indonesia.
- Marciano , B., Syam, A., Suyanto, & Ahmar, N. (2021). Whistleblowing System Dan Pencegahan Fraud: Sebuah Tinjauan Literatur. Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, 313-324.
- Priyastama, R. (2017). Buku Sakti Kuasai Spss Pengelolaan Data Dan Analisis Data. Yogyakarta: Start Up.
- Priyatno. (2017). Panduan Praktis Olah Data Menggunakan Spss. Yogyakarta: Andi.
- Qasimah, H. U. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Whistle Blowing System Terhadap Fraud Pada Pt. Perkebunan Nusantara Iii Medan. Universitas Medan Area, 1-87.
- Sandu, S., & Sodik, A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sayidah, N., Assagaf, A., Hartati, S. J., & Muhajir. (2019). Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif. Sidoarjo: Zifatama Jawara.

Soleman, R. (2013). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud. Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia, 57-74.

Sudaryono. (2017). Metode Penelitian. Depok: Pt. Raja Grafindo Husada.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Cv. Alfabeta.

Sujarweni, W. (2015). Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi. Jakarta: Pustaka Baru Press.

Syofian, S. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Pt Fajar Interpratama Mandiri.

Ulum, S. N., & Suryatimur, K. P. (2022). Analisis Peran Sistem Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Dalam Upaya Pencegahan Fraud. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 331-340.